



Submitted:

20 November 2022

Revised:

05 Desember 2022

Accepted:

25 Desember 2022

Published:

31 Desember 2022

Analisis Modal Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program E-Warung Di Kota Kediri

Taufik Alamin¹, Ade Abizar Uyun²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

E-mail Correspondent: taufikalamin25@iainkediri.ac.id

Abstract:

Poverty is one of the main problems in a government, not only developing countries, developed countries also have poverty problems even though the poverty rate is of course very different. Responding to President Joko Widodo's direction, the Ministry of Social Affairs formulated an e-Warung policy as a place for taking non-cash Food Assistance through collaboration with other parties (Bulog and Banks). The purpose of non-cash assistance is indeed directed at efforts to fulfill nutrition. In addition, the purpose of holding an e-Warung is an attempt to facilitate empowerment for beneficiary families (KPM) through joint group efforts (KUBE). Kediri City, which includes three sub-districts (Kota, Islamic Boarding School, Mojoroto) has sixteen e-Warung points. Each e-Warung has a different management system. This research is within the scope of the City of Kediri, is a qualitative research, using a case study approach that uses a conceptual framework to describe and fully understand e-Warung to find problems to produce solutions. The goal to be achieved in this research is the realization of the functions and objectives of the e-Warung as a policy in the form of empowerment.

Keywords: Social Capital, Poverty Alleviation, E-warung

Abstrak:

Kemiskinan merupakan salah satu problematika utama dalam sebuah pemerintahan, tidak hanya negara berkembang, negara maju pun juga memiliki masalah kemiskinan meskipun angka kemiskinan tentu sangat berbeda. Merespon arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Sosial merumuskan kebijakan e-Warung sebagai tempat pengambilan Bantuan Pangan non-tunai melalui kerjasama dengan pihak lain (Bulog dan Bank), tujuan dari adanya bantuan non-tunai memang diarahkan pada usaha pemenuhan gizi. Selain itu, tujuan diadakannya e-Warung merupakan usaha untuk memfasilitasi ruang pemberdayaan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui usaha kelompok bersama (KUBE). Kota Kediri yang di dalamnya terdapat tiga kecamatan (Kota, Pesantren, Mojoroto) memiliki enam belas titik e-Warung. Masing-masing e-Warung memiliki sistem pengelolaan yang berbeda-beda. Penelitian ini berada di lingkup Kota Kediri, merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang menggunakan kerangka konseptual dalam menguraikan dan mengetahui secara utuh tentang e-Warung hingga menemukan masalah-masalah sampai menghasilkan tawaran-tawaran solusi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah terealisasinya fungsi dan tujuan dari e-Warung sebagai kebijakan yang berbetuk pemberdayaan.

Kata kunci: Modal Sosial, Pengentasan Kemiskinan, E-warung

PENDAHULUAN

Permasalahan sosial yang terjadi saat ini sangat beragam, salah satu masalah sosial yaitu kemiskinan. Permasalahan tersebut tidak hanya melanda negara-negara berkembang saja, namun juga negara-negara maju. Setiap negarapun memiliki cara untuk menyelesaikan atau meminimalisir masalah kemiskinan ini. Indonesia saat ini pun masih berusaha mencari solusi yang terbaik untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya melalui peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pimpinan negara kemudian disalurkan atau bekerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) yang selanjutnya ditempatkan di daerah-daerah, serta dilakukan pendataan terhadap masyarakat kurang mampu. Jika pendataan tersebut sudah dilakukan maka masyarakat kurang mampu tersebut akan mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan permasalahan sosial yang dihadapinya, sehingga harapannya solusi dari pemerintah sesuai dengan permasalahan yang di hadapi. Kebijakan sosial sendiri ialah strategi-strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya,

terutama melalui perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk Bantuan Sosial dan Asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial.¹

Bantuan sosial tidak hanya berupa tunai saja, melainkan dalam bentuk-bentuk lain yang bermaksud agar masyarakat dapat memanfaatkan bantuan secara cepat dan tepat yang nantinya mereka mampu merubah nasib mereka menjadi lebih baik secara mandiri melalui program pemberdayaan. Salah satu program untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu ialah melalui bantuan pengembangan sarana usaha melalui elektronik warung yang dilakukan kelompok usaha bersama oleh Program Keluarga Harapan (e-Warung Kube). E-Warung Kube-PKH merupakan Program yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) sejak bulan Juni 2016. Program tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo pada April 2016 kepada jajaran menterinya. Isi arahan tersebut seperti, pentingnya mewujudkan sistem finansial nasional yang inklusif, penyaluran semua bantuan sosial dan subsidi secara non-tunai dengan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol dan pemantauan serta mengurangi penyimpangan, dan perlunya mengintegrasikan penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan bansos menjadi satu kartu. Mengenai hal tersebut, Menteri Sosial memberikan arahan pada jajaran di lingkup Kemensos yakni semua program penanganan kemiskinan perlu disinergikan agar *outcome* (keluarnya) memberikan dampak luas, efisien, serta efektif; perlu dilakukan pemberdayaan melalui pendampingan dari PKH, dan masyarakat yang menjadi dampungannya, yang nantinya menjadikan mereka sebagai pelaku dalam sistem keuangan inklusif; proses penanganan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) harus holistik, mulai dari pembentukan, pengorganisasian, sampai pada pemasaran hasil usahanya.²

Program e-Warung merupakan hasil kerja sama Kemensos dengan pihak bank sebagai pelaksana bentuk tunai. Badan Usaha Logistik (Bulog), dan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) untuk mendistributorkan bansos PKH dalam bentuk non-tunai. Untuk menjangkau bantuan tersebut, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) akan mendapatkan kartu keluarga sejahtera (KKS) sebagai sarana untuk mencairkan bantuan.³ Berdasarkan

¹ Nanang Pamuji Mugasejati. *Kebijakan Sosial Kesejahteraan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 2008. Hal. 13.

² Yanthuridi, Turtiantoro, *Implementasi Pprogram E-Warung Kube-Pkh Di Kota Semarang*, jurnal jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Diponegoro, hal. 3.

³ Totalitas Inoto Gulo, *Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Terhadap Pelaksanaan E-Warung Kube Pkh Di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli*, Skripsi Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, hal. 3.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 25 Tahun 2016 tentang bantuan pengembangan sarana usaha bersama Program Keluarga Harapan, menjelaskan bahwa Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warung KUBE PKH) adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai, serta mekanisme penyaluran bantuan sosial non-tunai dalam peraturan tersebut meliputi, proses registrasi atau membuka rekening, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, proses penyaluran, dan penarikan uang atau pembelian barang atau jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan sosial.

Dengan adanya e-Warung sendiri diharapkan masyarakat mulai membangun pola hidup yang mandiri atau berdaya, agar tidak selalu nyaman sebagai penerima bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam e-Warung sendiri tentu mendapat pendampingan-pendampingan, seperti mengajarkan cara menulis laporan keuangan, cara pembagian hasil usaha, serta tentang koperasi. Hal ini tentunya dapat dilihat pada Berita Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang e-Warung.

Program e-Warung tersebut dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Kediri. Di Kota Kediri, program tersebut berada dibawah tanggung jawab Dinas Sosial Kota Kediri di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dimana dalam bidang tersebut dilakukan pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dan bekerjasama dengan pihak PKH. dikarenakan masyarakat yang menerima bantuan sosial di bawah tanggung jawab bidang LIJAMSOS, sehingga e-Warung di tangani oleh LIJAMSOS sebagai tempat pendataan dan PKH sebagai pendamping. Kota Kediri sendiri memiliki 16 titik e-Warung, dalam pelaksanaan atau pengolahan manajemen mereka tidak menyeragamkan atau mengglobalkan sistem pengolahan harian, dari situ maka munculah e-Warung yang hingga hari ini masih eksis setiap harinya untuk melakukan aktivitas, pun sebaliknya. Sedangkan e-Warung yang terbilang maju berada di Kecamatan Kota, Kota Kediri.

Berawal dari adanya penggolongan maju dan tidak inilah kami selaku penulis (peserta PKSK IAIN Kediri tahun 2019) ingin mengetahui lebih lanjut akan aktivitas e-Warung, baik melalui kajian literatur-literatur yang ada maupun melihat langsung realita lapangan.

Pentingnya dari penelitian ini dilakukan ialah untuk bahan evaluasi dari realisasi Program e-Warung yang dimana lahir tergolong dalam kebijakan bentuk pemberdayaan. Artinya, pemerintah sudah memiliki harapan dari lahirnya kebijakan ini, yakni KPM akan mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa bergantung pada pemberian bantuan-bantuan dari pemerintah secara tunai maupun non-tunai serta yang terpenting ialah berhasil memutus rantai kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Karena obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, yaitu secara natural atau apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya.⁴ Hal tersebut sesuai dengan fokus dari peneliti mengenai kondisi e-Warung yang ada di Kota Kediri apakah berjalan sesuai dengan fungsi ataupun tugasnya yang tertulis di dalam peraturan menteri sosial mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Kediri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus, yang mana pendekatan ini ingin memahami latar belakang suatu persoalan, atau interaksi individu di dalam suatu unit sosial atau mengenai suatu kelompok individu secara mendalam, utuh, holistik, intensif, dan naturalistik. Dalam pendekatan ini memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam mempelajari kasus yang ingin diungkapkannya.⁵ Hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian terkait tugas atau fungsi e-Warung, dimana peneliti memiliki tujuan mengungkapkan fungsi maupun tugas e-Warung yang ada di Kota Kediri, sesuaikan dengan peraturan menteri sosial dan sudahkah mampu mengentaskan kemiskinan di Kota Kediri melalui proses pemberdayaan.

PEMBAHASAN

Dalam sebuah program kementerian sosial dapat dilihat melalui beberapa aspek guna melihat fungsi dan tujuan yang sebenarnya. Salah satunya yaitu melihat tentang kebijakan-kebijakan yang dianggap sebagai upaya pengentasan kemiskinan secara utuh.

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2015) hlm 2

⁵ A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), hlm. 339.

Konsep terkait kebijakan sosial dibagi menjadi 3 yaitu Preventive, Kurative, dan pemberdayaan. Adapun penjelasan 3 bentuk kebijakan sebagai berikut:

1. Preventive merupakan sebuah upaya pencegahan sebelum terjadinya keparahan suatu masalah kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dalam usaha pemerintah melalui pemberian jaminan KIS, KIP, maupun jaminan dalam bentuk yang lain.
2. Kurative merupakan sebuah tahap penyembuhan atau tahap menaggulungan dari sebuah permasalahan, hal ini dapat dilihat dalam usaha pemerintah untuk melakukan penyembuhan terhadap masyarakat miskin dalam golongan paling bawah, usaha yang dilakukan seperti adanya program keluarga harapan (PKH). Pemberian bantuan tunai maupun non tunai (BPNT), maupun bentuk bentuk lain
3. Pemberdayaan merupakan sebuah usaha berkelanjutan yang dilakukan pemerintah yang bertujuan melatih kemandirian dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu kebijakan dalam bentuk pemberdayaan adalah e-Warung, jika dilihat dari fungsi dan tujuannya e-Warung merupakan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama.

Dalam merealisasikan kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan melalui e-Warung, tentu membutuhkan sebuah kerjasama antara satu dengan yang lain, bentuk penekanan kerjasama dapat dikuatkan dengan adanya modal sosial. Modal sosial menunjuk pada segi-segi kelompok ataupun ruang bersama yang disitu terdapat aktifitas secara kolektif. Modal sosial ditekankan untuk menjawab kebutuhan bersama, serta peningkatan kualitas hidup bersama yang bertujuan untuk melakukan perubahan lebih baik serta mampu menjawab tantangan ataupun masalah yang datang.⁶

Salah satu penerapan aktifitas secara kolektif dalam e-Warung ialah kelompok usaha bersama yang ditekankan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, untuk merealisasikan hal tersebut kebijakan e-Warung mengharuskan anggotanya untuk mampu berkembang dan melakukan perubahan melalui proses pemberdayaan. Di e-Warung sendiri modal sosial dibentuk melalui tiga komponen antara lain:

1. Jaringan sosial, pada komponen ini adanya kerjasama antar anggota e-Warung maupun dengan *supplier* melalui kelompok usaha bersama (KUBE) yang di topang oleh modal sosial dalam ranah interaksi dan komunikasi baik secara formal dalam

⁶ Ayu Kusumastuti, *Modal sosial dan mekanisme adaptasi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur*, Masyarakat Jurnal Sosiologi, Universitas Brawijaya, vol. 20, No. 1, Januari 2005.

bentuk pertemuan rutin ataupun dalam bentuk kultural atau non formal dalam aktifitas harian yang menghasilkan sebuah kepercayaan untuk memperkokoh kerjasama.

2. Norma–norma, pada komponen ini dapat dibentuk melalui kesamaan sudut pandang maupun kepercayaan sosial yang telah dibangun oleh anggota e-Warung, hal ini yang nantinya akan membentuk nilai–nilai, harapan, serta tujuan bersama tentang jalannya e-Warung serta pengolahannya.
3. Kepercayaan, merupakan sebuah harapan yang muncul karena adanya kerjasama antar anggota maupun pihak lain dengan diwujudkan adanya perilaku jujur, teratur serta kerjasama. Hal ini tentu perlu juga diterapkannya transparansi pengolahan e-Warung.⁷

Sedangkan modal sosial dalam merealisasikan e-Warung memiliki dimensi–dimensi, yaitu:

1. Dimensi kognitif/*bonding* yang memiliki kaitan dengan nilai–nilai sikap dan keyakinan yang berhimpas dalam kepercayaan dan solidaritas serta resiprositas yang menuju terbentuknya kerjasama antar anggota e-Warung guna mencapai tujuan bersama sehingga lebih menekankan perhatian yang berorientasi ke dalam kelompok usaha bersama di e-Warung itu sendiri.⁸ Penekanan yang lebih mengarah pada aktivitas intern ini yang merupakan sumber utama untuk menuju atau berjalannya proses pemberdayaan. Aktivitas intern atau dimensi *bonding* yang lain ialah dibutuhkan inovasi-inovasi yang terus diasah untuk mengolah manajemen e-Warung. Sumberdaya manusia yang satu akan mempengaruhi yang lainnya, oleh karena itu maka perlulah peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dilakukan oleh pendamping e-Warung kepada anggotanya. Dampak dari adanya pembangunan SDM anggota e-Warung inilah nantinya yang akan memunculkan rasa peka terhadap masalah-masalah yang ada disekitarnya, terlebih masalah-masalah yang ada di e-Warung itu sendiri. Maka tidak menutup kemungkinan dalam e-Warung terjadi evaluasi dan monitoring dari anggota secara mandiri tanpa menunggu arahan dari pihak pendamping. Sedangkan

⁷ Nina Zulida Situmorang, *Kajian Ulang Konsep Modal Sosial Dalam Masyarakat Pluralis*, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, Jakarta, vol. 5

⁸ Rusydi syahra, *Modal sosial: Konsep dan aplikasi*, Jurnal masyarakat dan budaya, volume 5 no. 1 tahun 2003

langkah awal dalam usaha evaluasi dan *monitoring* ialah adanya transparansi pengolahan e-Warung yang dapat diakses oleh setiap anggota.

2. Dimensi struktural/*bridging* yaitu ruang lingkup kelompok dan lembaga-lembaga masyarakat tingkat lokal, memiliki jaringan dengan lembaga atau kelompok lain (hubungan eksternal) memanglah penting dalam pengembangan kualitas suatu kelompok.⁹ Hal ini juga dilakukan oleh kebijakan e-Warung yang ada di Kota Kediri. Secara formal ataupun arahan dari pusat, terlaksananya kebijakan e-Warung ini bekerja sama antar instansi pemerintahan, dalam hal ini bulog sebagai pemasok dalam pemenuhan kebutuhan gizi dalam hal ini telur dan beras. Selain bulog, dalam upaya penyaluran tunai yang dilakukan dalam bentuk elektrik kebijakan e-Warung juga bekerja sama dengan pihak Bank konvensional seperti BNI ataupun Mandiri. Penyaluran bantuan secara elektrik ini membutuhkan media properti yaitu EDC. Setiap e-Warung memiliki satu unit EDC yang nantinya digunakan oleh pengelola sebagai media Cek dan Pilih bentuk bantuan yang akan diterima, dalam aktifitas ini beberapa titik e-Warung di Kota Kediri sering mengalami gangguan sinyal. Selain jaringan yang dibentuk pemerintah (Bulog dan pihak Bank), pengurus ataupun anggota e-Warung sebenarnya juga diintruksikan untuk memiliki jaringan atau kerjasama dengan *supplier* sebagai pemasok kebutuhan lain untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun dalam pelaksanaan untuk mencari hubungan kerja dengan *supplier* inilah tidak sepenuhnya dijalankan oleh e-Warung di Kota Kediri, sehingga beberapa titik e-Warung di Kota Kediri hanya melakukan aktifitas pada saat turunnya bantuan pangan dan pada saat hari-hari diluar turunnya bantuan tidak ada aktifitas kelompok usaha bersama (KUBE). Selain dengan *supplier*, secara mandiri seharusnya pengelola e-Warung memiliki hubungan yang erat dengan e-Warung yang lain. Dengan adanya hubungan antar e-Warung yang erat inilah diharapkan masing-masing e-Warung dapat saling menukarkan masalah dan solusi, hal ini mungkin dapat dilakukan secara FGD ataupun *study banding*. Disinilah salah satu letak penting akan pembangunan SDM yang telah dijelaskan dalam dimensi *bonding* di atas, bagaimanapun SDM sangatlah mendasar bagi jalannya pemberdayaan selain terpenuhinya kebutuhan prefentive dan kurative

⁹ Ibid.

terlebih dahulu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Artinya, dalam hal ini pemerintah sudah memberikan ruang maupun jaringan serta mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang lebih berorientasi ke luar, ruang untuk menghubungkan jaringan inilah yang nantinya akan mampu memberikan kontak dan interaksi dengan kelompok lainnya.

Berdasarkan temuan data yang di temukan di e-Warung yang ada di Kota Kediri dari 16 (enam belas) e-Warung, dan hasilnya e-Warung yang masih aktif setiap hari hanya 2 (dua) e-Warung yaitu e-Warung Ngronggo dan e-Warung Balowerti. Berikut adalah hasil penelitian di beberapa e-Warung:

1. E-Warung Banjaran

E-Warung Banjaran membawahi 5 (Lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Banjaran, Ngadirejo, Kemasan, Setonopande, dan Jagalan. E-Warung Banjaran dulunya dikelola oleh 9 orang, namun saat ini dikelola sendiri oleh Ibu Yuli selaku pemilik toko pribadi yang kemudian dijadikan lokasi e-Warung. E-Warung tersebut buka setiap hari seperti toko-toko pada umumnya, untuk penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) e-Warung dibuka selama 4 (empat) hari, jika dalam waktu tersebut KPM belum bisa hadir, maka bantuan bisa diambil lain hari. Pendamping e-Warung dari PKH memiliki tugas sebagai *order* yang kemudian bantuan tersebut diturunkan di e-Warung dan di kemas oleh pengelola e-Warung, dan e-Warung memiliki kebebasan masing-masing mengambil beras dari Bulog atau penggilingan. Meskipun 8 orang pengelola e-Warung tidak aktif dalam menjual maupun memproduksi dan menjaga e-Warung, namun mereka datang ketika penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan tidak aktifnya mereka dikarenakan tidak telaten dan bosan dikarenakan di e-Warung hanya santai-santai saja “jagongan” dan e-Warung sepi penjual sebab persaingan antar toko, ditambah lagi ibu-ibu pengelola memiliki tugas rumah yang banyak ada yang mengurus mertua yang sakit dan mengurus anak, serta ada yang mengurus anaknya menderita disabilitas yang tidak bisa ditinggal kemudian gantian dengan suaminya menunggu tambal ban. Dan pihak KPM sendiri BPNT lebih lengkap yang

terdahulu, dikarenakan bantuan yang lama mendapatkan beras, telur, minyak, dan gula, sementara saat ini bantuan hanya berbentuk 2 (dua) macam saja yaitu beras dan telur. Di e-Warung Banjaran terdapat evaluasi bersama KPM yang lain dan pendamping, biasanya yang dibahas saat perkumpulan seperti keluhan kesah atau unek-unek yang dirasakan seperti saldo habis maupun kartu terblokir. Kendala dari e-Warung Banjaran adalah tikus yang memakan jatah beras bantuan untuk KPM, dan sering kali KPM protes dengan kemasan dan jatah beras yang tidak sesuai.

Dari kondisi e-Warung Banjaran dapat terlihat jelas bahwa kurangnya inovasi atau inisiatif dari pengelola e-Warung untuk menarik perhatian masyarakat membeli di e-Warung. Dan kurang pemahannya pengelola e-Warung maupun KPM mengenai fungsi dari e-Warung sesuai dengan peraturan kementerian sosial. Serta pengelola lebih menyukai menyelesaikan pekerjaan rumah dan usaha lain untuk menompang hidupnya daripada di e-Warung yang penghasilannya tidak terduga atau tidak seperti bayangan.

2. E-Warung Balowerti

E-Warung Balowerti menangani atau memberikan penyaluran 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Balowerti, Semampir, Dandangan, Pocanan, Pakelan, dan Setonogedung. E-Warung tersebut mulai buka di tahun 2016, e-Warung Balowerti buka setiap hari mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB, dan di e-Warung Balowerti masyarakat selain penerima KPM atau masyarakat non KPM juga dapat membeli di E-Warung dan mendapatkan harga yang sama dengan KPM, misalnya barang A dijual dengan harga Rp. 20.000 ke KPM, harga tersebut juga sama jika dijual ke masyarakat non KPM tujuan dari penyamaan harga ini untuk menghindari kesalahpahaman. Pengelola e-Warung Balowerti berjumlah 7 orang, dan orang yang menjadi pengelola dari e-Warung Balowerti haruslah benar-benar orang yang teliti. E-Warung Balowerti menerapkan kedisiplinan dan ketelitian yaitu tidak pernah memberikan bantuan dalam kualitas yang buruk. Yang membuat e-Warung dikatakan lebih mandiri dikarenakan pengelola e-Warung sendiri memiliki inisiatif untuk menjual hasil *softkills* atau mengembangkan *entrepreneur*. Beberapa KPM yang diwawancarai mengenai e-Warung mereka hanya

menjawab bahwa e-Warung itu sendiri merupakan tempat pengambilan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan pendamping sendiri mengadakan evaluasi seputar pengambilan BPNT dan kendala, serta mengambil nota dari pengambilan e-Warung dan menerima permasalahan apa saja yang dilaporkan KPM kepada pihak pengelola e-Warung. Sama halnya dengan e-Warung Banjarn, KPM belum bisa memahami fungsi dari e-Warung itu sendiri.

3. E-Warung Ngronggo

E-Warung Ngronggo berlokasi di rumah Ibu Riana, dan membawahi 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Manisrenggo, Rejomulyo, Kaliombo, Ringinanom, Kampung Dalem, dan Corekan. Pengelola e-Warung Ngronggo sendiri berjumlah 9 orang, pengambilan atau penyaluran bantuan satu bulan sekali, dan menerima bantuan berupa beras dan telur. Di e-Warung Ngronggo memiliki kebijakan yakni setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) ketika pengambilan bantuan berlangsung diharapkan membawa uang minimal Rp. 5.000 untuk membeli barang yang ada di e-Warung, uang tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan pengelolaan e-Warung. Alur e-Warung yakni KPM mendapatkan Kartu ATM sesuai bank yang diajak bermitra dalam penyaluran bantuan kemudia uang di transfer dan setelah itu digunakan pengambilan bantuan di e-Warung, untuk pengambilan bantuan berasal dari bulog dan agen supplier. Permasalahan yang sering terjadi ialah permasalahan transfer bantuan ke ATM sering terlambat. Di e-Warung Ngronggo sendiri penjual logistik lainnya serta terjadwalnya pengambilan bantuan KPM, setiap pengelola e-Warung haruslah berasal dari KPM itu sendiri, dan e-Warung Ngronggo manajemen sangat baik termasuk adanya upah tenaga diambil dari SHU. Dengan demikian, KPM diwilayah ngronggo memahami bahwa e-Warung adalah tempat penyaluran bantuan atau pengambilan bantuan.

4. E-Warung Lirboyo

Untuk di e-Warung Lirboyo buka ketika ada pencairan bantuan saja, dan tenaga pembantu e-Warung ditunjuk langsung oleh pihak kelurahan. Serta orang biasa atau masyarakat non KPM tidak bisa masuk dalam struktur kepengurusan, dikarenakan anggota e-Warung pun tidak bersifat permanen, artinya ada pengurangan dan penambahan anggota dalam kurun waktu

tertentu. Ketika bantuan tidak diambil dalam jangka waktu tertentu maka akan terjadi pemblokiran. Dan informasi sangatlah berpengaruh dan membantu dalam hal pencairan ini, dikarenakan turunnya bantuan tidak dapat di timbun. Sehingga yang terjadi di e-Warung Lirboyo, yang diketahui pihak KPM hanyalah sebatas penyaluran dan pengambilan bantuan saja serta dari pengelola e-Warung sendiri kurang memahami fungsi dari e-Warung yang menyebabkan e-Warung tidak berjalan sesuai dengan tugasnya.

Mengenai e-Warung sendiri, peneliti mendapatkan informasi dari pihak PKH sebagai pendamping KPM, bahwa e-Warung yang ada di Kota Kediri terdapat 16 (enam belas) e-Warung dari 3 (tiga) kecamatan yang ada di Kota Kediri. Kecamatan Pesantren, yaitu berada di Kelurahan Bangsal, Burengan, Tumperejo, Singonegaran, Blabak, Kleco, dan Bawang. Kemudian di Kecamatan Kota yaitu Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Balowerti, dan Kelurahan Banjaran. Sementara itu, di Kecamatan Mojojoto yakni Kelurahan Dermo, Kelurahan Mojojoto, Sukorame, Ngampel, Lirboyo, dan Banjarmelati. Dan e-Warung yang terbilang sukses atau maju adalah e-Warung Ngronggo dan e-Warung Balowerti, sedangkan e-Warung yang lainnya hanya buka ketika penyaluran bantuan akan tiba. Dan bukan hanya itu saja, pemahaman mengenai e-Warung kepada pengelola maupun KPM belum sepenuhnya dipahami, dan banyak orang yang menganggap e-Warung sebagai lokasi penyaluran dan pengambilan bantuan agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Bahkan pengelola e-Warung yang termasuk KPM saja mulai mengundurkan diri satu per satu. Mengenai data e-Warung sendiri berada di Bidang LIJAMSOS (Perlindungan dan Jaminan Sosial) dan kebelutan masyarakat yang menerima bantuan dari pihak PKH juga merupakan masyarakat yang mengajukan bantuan atau mendapatkan bantuan dari bidang LIJAMSOS. Dan pendamping e-Warung di Kota Kediri bukan hanya dari pihak PKH saja, namun sebagian kecil dari TRC (Tim Reaksi Cepat). Peran PKH sendiri bukan hanya menyalurkan atau memberikan pemantauan tetapi juga melakukan sosialisasi yang memotivasi mereka hidup menjadi lebih baik dan layak, namun hal tersebut sangat sulit untuk mengubah masyarakat dan terkadang membujuk masyarakat mengikuti sosialisasi itupun sangatlah sulit.

Berdasarkan hasil penelitian terkait cara kerja dari 4 (empat) e-Warung yang ada di Kota Kediri, terlihat jelas bahwa pengelola e-Warung maupun anggota e-Warung belum memiliki hubungan (jaringan) sosial, kepercayaan sosial, serta norma yang kuat sehingga

program tersebut belum mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atau tujuan pemberdayaan belum mampu dilihat hasilnya. Padahal program e-Warung merupakan program pemberdayaan yang di kelola secara kelompok dan bertujuan membangun atau memperbaiki perekonomian masyarakat kurang mampu, hal tersebut sama dengan pengertian dari modal sosial yang merupakan nilai, mekanisme, sikap, dan institusi yang mendasari interaksi antar individu dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Dan Robert Putnam menganggap modal sosial sebagai seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang, dimana modal sosial terdiri dari hubungan (jaringan) sosial, kepercayaan sosial, serta norma. Berikut penjelasan modal sosial dari Robert Putnam:

1. Hubungan sosial (Jaringan)

Jaringan sosial atau jaringan kerjasama antar manusia merupakan infrastruktur dinamis dari modal sosial. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, sehingga memungkinkan timbul kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Putnam beragumen bahwa jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta manfaat-manfaat dari partisipasi. Begitu pula dengan hubungan informal (keluarga, kerabat, teman, dan tetangga) dan formal (asosiasi, kelompok, dan lainnya), struktur jaringan tersebut akan mempengaruhi kualitas hubungan yang terjalin, sehingga output yang dapat dihasilkan dan modal sosial yang akan terbentuk.

Terkait dengan jaringan sosial, e-Warung yang dapat dikatakan mampu memiliki jaringan sosial yang baik adalah e-Warung Ngronggo dan e-Warung Balowerti. Jaringan sosial yang baik dari kedua e-Warung tersebut terlihat dari mekanisme atau cara kerja e-Warung itu sendiri. Dimana e-Warung Ngronggo kepada masyarakat yang menerima dan mengambil bantuan atau anggota e-Warung itu sendiri diharapkan ketika penyaluran bantuan membawa uang minimal Rp. 5.000 untuk membeli barang di e-Warung dan e-Warung tersebut juga buka setiap hari seperti toko pada umumnya dan warga sekitar ngronggo diperbolehkan untuk membeli barang di e-Warung, dan jaringan sosial yang terbentuk pada pengelola e-Warung Ngronggo juga patut dijadikan contoh, pengelola e-Warung Ngronggo dengan mewajibkan membawa uang ketika penyaluran, uang tersebut akan

dimasukan untuk mengembangkan e-Warung dan upah tenaga atau manajemen yang dilakukan cukup berhasil.

Sedangkan e-Warung Balowerti dapat dikatakan berhasil dikarenakan pengelola e-Warung memiliki jaringan sosial yang baik antar anggota dan mampu memberikan inovasi kepada e-Warung bukan hanya menjual barang seperti toko-toko pada umumnya melainkan juga mengembangkan pemasaran *online* produk makanan yang dibuat oleh ibu-ibu pengelola sendiri dan menerima pesanan produk makanan. Bahkan di e-Warung Balowerti juga mampu menarik masyarakat dikarenakan menjual barang dengan harga yang sama ketika menjual barang kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk menghindari kesalahpahaman atau perselisihan di tambah pula menerapkan disiplin dan ketelitian baik pengelola e-Warung maupun anggota e-Warung serta memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan kualitas barang yang baik.

Sementara untuk e-Warung Banjaran dan e-Warung Lirboyo dalam jaringan sosial dapat dikatakan kurang baik karena pengelola e-Warung hanya di serahkan kepada satu orang saja itupun dikarenakan rumah beliau dijadikan lokasi e-Warung serta tidak memiliki inovasi untuk mengembangkan e-Warung agar mampu bersaing. Pengelola e-Warung hanya datang ketika penyaluran barang akan datang dan membantu menyalurkan bantuan, namun kedua e-Warung tersebut juga sama dengan e-Warung yang lainnya yakni memberikan pelayanan yang baik kepada KPM yang kebanyakan penerima sudah lanjut usia.

Dan bantuan berupa beras sesuai dengan ketentuan atau keinginan e-Warung masing-masing mengambil beras dari Bulog atau penggiling. Pendamping e-Warung sendiri sebagai order dalam penyaluran bantuan dan memantau kondisi e-Warung. Pendamping e-Warung (PKH) di Kota Kediri masih sebatas mengawasi apakah KPM sudah mengambil bantuan apa belum, serta melihat apakah ada permasalahan yang dihadapi KPM saat penyaluran. Lebih dari itu pendamping juga melakukan sosialisasi agar KPM bisa hidup lebih mandiri.

2. Kepercayaan

Kepercayaan adalah komponen kunci modal sosial. Dimensi modal sosial mengacu pada sejauh mana orang merasa mereka dapat mengandalkan sanak keluarga, tetangga, kolega, kenalan, penyedia layanan utama, dan bahkan orang

asing serta institusi dan pemerintahan, bahwa mereka tidak akan melakukan sesuatu yang menyakitkan dan membahayakan.

Dalam hal kepercayaan ke-4 (empat) e-Warung memiliki kepercayaan dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dikarenakan mampu memberikan pelayanan yang baik ketika penyaluran dan menjadwalkan pengambilan penyaluran agak tidak terjadi antri yang berkepanjangan. Namun e-Warung Ngronggo dan e-Warung Balowerti tetap memiliki daya tarik tersendiri dikarenakan mereka memiliki cara kerja yang berbeda dan memberikan kepercayaan terhadap masyarakat yaitu di e-Warung Ngronggo dengan adanya aturan membawa uang ketika penyaluran bantuan untuk membeli barang di e-Warung memberikan keuntungan bagi KPM dikarenakan bantuan yang mereka terima bukan hanya beras dan telur tapi ada kebutuhan yang lainnya seperti minyak, gula, mie instan, dan lainnya, sedangkan di e-Warung Balowerti mereka menerapkan kedisiplinan dan ketelitian bagi pengelola e-Warung dan penerima e-Warung untuk mengecek kembali barang dan nota serta menjual barang di e-Warung dengan harga yang sangat miring atau murah itupun tidak membeda-bedakan dari kalangan mana pembelinya.

3. Norma atau Tata Nilai

Norma terdiri dari pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan, dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama sekelompok orang. Norma dapat merupakan pra-kondisi maupun produk dari kepercayaan sosial. Dimana terdapat timbal balik yang berarti adanya proses pertukaran dalam hubungan sosial dimana ‘barang dan jasa’ (pertukaran apapun) yang diberikan oleh salah satu pihak akan di bayarkan kembali kepada pihak yang oleh pihak yang menerima asli ‘barang dan jasa’.

Dalam hal norma atau tata nilai maka pengelola e-Warung akan mengharapkan timbal balik apa yang sudah mereka lakukan kepada masyarakat penerima bantuan atau KPM, dari perlakuan baik tersebut diharapkan juga mampu menarik pembeli dari kalangan masyarakat biasa atau non KPM. Akan tetapi hal tersebut tidak berjalan semestinya terutama yang terjadi di e-Warung Banjaran dan e-Warung Balowerti, dimana kedua e-Warung tersebut kalang saing dengan toko-toko pada umumnya dan ramainya kedua e-Warung tersebut ketika penyaluran bantuan saja. Berbeda dengan e-Warung Ngronggo dan e-Warung Balowerti yang memiliki

inovasi tersendiri yang akhirnya membuat kedua e-Warung tersebut mampu menarik perhatian masyarakat.

Modal sosial dalam e-Warung berhubungan erat dengan konteks demokrasi, baik dalam hubungan vertikal yang menyangkut hubungan pemerintah dan KPM maupun hubungan horizontal antara e-Warung dengan *supplier*, antar e-Warung, maupun antar KPM itu sendiri. Dalam dimensi struktural yang berbentuk hubungan vertikal maka akan menciptakan model hirarki melalui kebijakan-kebijakan yang dibentuk untuk KPM, namun dalam bentuk horizontal memiliki kesamaan derajat. Dalam dimensi kognitif yang menekankan dalam nilai dan norma dalam bentuk vertikal akan menjadi arena pemerintah untuk menghasilkan kepercayaan, akuntabilitas, kemitraan, partisipasi responsivitas. Sedangkan dalam bentuk horizontal akan menjadi arena golongan masyarakat dalam membentuk solidaritas, toleransi, kepercayaan, serta kerjasama antar e-Warung maupun antar KPM.¹⁰

Dari paparan di atas, hal-hal yang kami temukan dan dijadikan benang merah permasalahan antara lain:

1. Sosialisasi

Pihak KPM (Keluarga Penerima Manfaat) hanya mengetahui bahwa e-Warung sebatas tempat pengambilan bantuan. Artinya, sosialisasi yang di sampaikan dari pihak pendamping belum seutuhnya tercapai akan fungsi dan tujuan dibentuknya e-Warung. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga penerima manfaat e Warung sebatas empat pengambilan sembako yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Ketergantungan

Adanya bantuan di Kota Kediri sudah lebih dari cukup dalam hal pelaksanaan kebijakan preventif dan kuratif, sehingga dari sudut pandang pelaksana bantuan (pemerintah), masyarakat lebih cenderung dan nyaman dalam kehidupan seperti itu, mengandalkan bantuan pemerintah baik tunai maupun sembako, jaminan mulai lahir hingga meninggal dunia. Artinya masyarakat memandang program tersebut sebagai penyedia sembako bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut berakibat adanya

¹⁰ Nina Zulida Situmorang, *Kajian Ulang Konsep Modal Sosial Dalam Masyarakat Pluralis*, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, Jakarta, vol. 4

ketergantungan masyarakat karena mereka sudah disediakan bahan makanan pokok oleh pemerintah.

3. Kurangnya semangat pemberdayaan.

Dalam hal ini, peran KPM ataupun pendamping sangat perlu diperhatikan, perlu adanya peran serta yang saling keterkaitan dalam satu bingkai semangat melakukan aktivitas pemberdayaan. Sedangkan di lapangan kurangnya semangat akan aktivitas pemberdayaan kepada KPM-KPM.

4. Kurangnya internalisasi kebijakan.

Dalam hal ini, dapat dilihat dari adanya e-Warung yang hanya buka pada saat bantuan pangan turun, kurang lebih hanya melakukan aktifitas empat harian saja. Pentingnya dari internalisasi kebijakan yang cukup matang serta konsisten dijalankan setiap anggota juga akan berpengaruh akan maksimalnya peran e-Warung.

5. Kurangnya relasi hubungan kerja

Hal ini dapat dilihat bahwa seharusnya e-Warung juga memiliki hubungan kerja dengan *supplier* lain dalam pemenuhan kebutuhan dagang untuk mencari harga yang sesuai.

Berikut adalah kolom modal sosial, realita, serta tawaran solusi:

Karakteristik Modal Sosial	Realita e-Warung	Desain Penerapan
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan dari kemensos tentang e-Warung. • Adanya pendampingan untuk e-warong • Salah satu yang membawahi e-Warung ialah Dinas Sosial. • Pengelolaan di pegang KPM 	<ul style="list-style-type: none"> • KPM tidak sepenuhnya tahu terkait tujuan di bentuknya e- Warong sebenarnya • KPM belum mengetahui fungsi-fungsi e-Warung • Beberapa KPM orang lansia 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya sosialisai yang lebih rinci dalam perjalanan e-Warung. • Di jalankannya arisan/simpan pinjam di e-Warung • Di bentuknya studi banding antar e-Warung • Adanya selisih harga dengan penjual lain

<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki hubungan kerja dengan pihak lain (Bulog, Bank, dan <i>supplier</i>) • Adanya kepercayaan antara anggota dengan pengurus 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibebaskannya aturan intern yang berlaku disetiap kelompok • Kurangnya aktifitas pemberdayaan secara berkelanjutan. • Kurangnya kemandirian untuk inovasi, evaluasi, serta <i>monitoring</i>. • Kurangnya kerjasama dengan <i>supplier</i>. 	<p>sebagai ketertarikan KPM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi hasil lebih merata dengan jumlah penerima yang lebih banyak. • Adanya <i>reward</i> karena kesediaan mengurus e-Warung dan diketahui seluruh anggota. • Adanya siklus pergantian pengelola secara rutin dan terbuka.
---	--	--

Modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (hubungan) dengan orang lain sehingga menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya terhadap aspek ekonomi melainkan juga terhadap setiap aspek eksistensi sosial yang lain.¹¹ Menjadikan modal sosial sebagai akar dalam pelaksanaan pemberdayaan atau lebih khususnya tercapainya program e-Warung sangatlah penting, karena penguatan intern kelompok ataupun dalam mencari jaringan kepada pihak lain sangatlah penting untuk tercapainya aktifitas yang dilakukan secara kolektif.

Masalah sosial terlebih dalam fokus kemiskinan bukanlah suatu hal mudah untuk diselesaikan. Peran negara dalam pengentasan kemiskinan salah satunya bisa dalam bentuk kebijakan. Adapun bentuk bentuk kebijakan terbagi dalam tiga bentuk, yakni preventif (sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya keparahan yang berkelanjutan), kuratif (sebagai upaya penyembuhan bagi merek yang sudah dalam taraf paling bawah dalam hal kelayakan), serta pemberdayaan, (sebagai usaha untuk berdikari dan bertujuan menghilangkan sifat ketergantungan pada pihak lain). Dan usaha pemerintah melalui e-Warung ini sudah memasuki dalam bentuk kebijakan pemberdayaan, jika dilihat dari fungsi dan tujuannya dari berbagai literatur.

¹¹ Ibid.

Lahirnya kebijakan e-Warung perlu diapresiasi baik. Pertama, dengan adanya kebijakan penyaluran secara elektrik sangatlah mengurangi terjadinya hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini korupsi. Kedua, lahirnya kebijakan ini mendukung tujuan ataupun sasaran dari keluarnya bantuan, dalam hal ini bantuan yang seharusnya diarahkan pada penambahan gizi melalui BPNT (beras dan telur) yang di terima KPM juga berupa beras dan telur, tidak ada peyelewengan bantuan untuk keperluan lain selain gizi. Ketiga, adanya pengurus atau pengelola e-Warung yang diambil dari anggota KPM sendiri, hal ini secara tidak langsung pemerintah sudah melakukan edukasi manajemen berwirausaha kepada PKM. Keempat, pemerintah secara tidak langsung memberi ruang gerak berwirausaha kepada KPM baik berwirausaha secara mandiri ataupun usaha bersama (KUBE).

Namun yang perlu diperhatikan dalam merealisasikan kebijakan e-Warung di Kota Kediri, yang saat ini berjumlah enam belas titik berada di sebaran tiga kecamatan (Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren, dan Kecamatan Mojoroto), ke enam belas ini tidak memiliki sistem manajemen pengolahan yang sama. Hal ini karena disebabkan oleh faktor sumber daya yang dimiliki oleh setiap e-Warung sangat bervariasi. Hingga saat ini yang dapat melakukan aktivitas setiap hari hanya e-Warung di Kelurahan Ngronggo dan Kelurahan Balowerti. Selebihnya hanya melaksanakan aktifitas saat pencairan dana program berlangsung. Oleh karena itu pemerintah perlu melibatkan lagi partisipasi masyarakat dalam mengelola e-Warung sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Adapun untuk mengatasi persoalan sebagaimana telah dipaparkan di atas, solusi yang penulis tawarkan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dan pendamping perlu koordinasi lebih intensif lagi untuk membenahi sistem pengorganisasian dan manajemen e Warung. Jika perlu di wilayah Kota Kediri perlu memfokuskan kepada e Warung di titik-titik tertentu dahulu sebagai model dan percontohan. Dengan demikian akan ditemukan strategi yang lebih tepat dalam mengelola dan mengembangkan fungsi e-Warung lebih optimal dan produktif yang selanjutnya dapat diadopsi untuk e-Warung yang lainnya.
2. Dalam rangka untuk lebih megefektifkan kinerja e Warung perlu melakukan pelatihan-pelatihan khusus baik dalam aspek manajemen maupun administrasi dan tata kelola keuangan guna menambah kompetensi para pengelolanya. Di sisi lain, rolling kepengurusan ataupun penggantian pengurus perlu dilakukan jika ditemukan personel yang tidak mampu berjalan sebagaimana fungsinya.

3. Perlu ada kebijakan untuk mendorong para anggota dari e-Warung untuk melakukan budaya menabung. Hal tersebut bertujuan selain dapat melatih para anggota untuk hidup hemat juga uang sisihan atau tabungan tersebut dapat digunakan untuk membangun inisiasi pengembangan program yang manfaatnya akan kembali pada anggota itu sendiri.
4. Pengelolaan manajemen keuangan dan program harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga selain akan melahirkan kepercayaan yang tinggi dari anggota juga dapat menimbulkan dorongan partisipasi anggota semakin tinggi untuk mengembangkan e-Warung ke depannya. Sistem pengelolaan secara transparan dan akuntabel tersebut juga akan berimplikasi pada kebijakan penentuan harga yang lebih terjangkau bahkan lebih rendah dibandingkan harga-harga di luar e-Warung.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. E-Warung merupakan produk kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, utamanya dalam penyediaan bahan makanan pokok. Namun sesuai dengan hasil penelitian di Kota Kediri, keberadaan e-Warung belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari 16 titik e-Warung yang ada di Kota Kediri, sebagian besar masih terfokus sebagai agen penyaluran bantuan. Artinya, tujuan pemerintah untuk menjadikan e-Warung sebagai lembaga ekonomi masyarakat masih didominasi oleh kemauan pemilik program dibandingkan sebagai representasi kehendak masyarakat itu sendiri.
2. Persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program e-Warung di Kota Kediri antara lain masih belum adanya standarisasi dalam pengelolaan manajemen e-Warung, minimnya kapasitas sumber daya pengelola, tingkat ketergantungan masyarakat penerima manfaat masih cukup tinggi sehingga menciptakan mental konsumtif dibandingkan mental produktif dan inovatif.
3. Sebagai tawaran solusi atas persoalan-persoalan tersebut adalah dengan mendayagunakan modal sosial sebagai basis utama pemberdayaan masyarakat utamanya dalam manajemen pengelolaan e-Warung. Hal sebagaimana yang telah

dilakukan dalam pengelolaan e-Warung di Kelurahan Mgronggo dan Kelurahan Balowerti. Meskipun pelibatan modal sosial belum sepenuhnya dilakukan, namun e-Warung yang dikelola masyarakat tersebut mampu melayani kebutuhan pokok anggotanya sehingga mampu beroperasi hingga 4-5 hari dalam seminggu.

DAFTAR RUJUKAN

- Kusumastuti, Ayu. *Modal sosial dan mekanisme adaptasi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan dan pembangunan nsfratraktur*. Masyarakat Jurnal Sosiologi, Universitas Brawijaya, Vol. 20, No. 1, Januari 2005.
- Nanang Pamuji Mugasejati. *Kebijakan Sosial Kesejahteraan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 2008.
- Situmorang, Nina Zulida. *Kajian Ulang Konsep Modal Sosial Dalam Masyarakat Pluralis*. Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, Jakarta, Vol. 5. Tahun 2018
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syahra, Rusydi. *Modal sosial: Konsep dan aplikasi*. Jurnal masyarakat dan budaya, volume 5 No. 1 Tahun 2003.
- Totalitas Inoto Gulo, *Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Terhadap Pelaksanaan E-Warung Kube PKH di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli*, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Edisi 2 tahun 2019.
- Yanthuridi, Turtiantoro, *Implementasi Program E-Warung Kube-Pkh Di Kota Semarang*, jurnal jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Diponegoro.
- Yusuf A., Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.